

Judul : Pencabutan Subsidi Listrik: Presiden Minta Subsidi Tepat Sasaran  
Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016  
Surat Kabar : Bisnis Indonesia  
Halaman : 30

## ► PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK

# Presiden Minta Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta data penerima subsidi listrik disinkronkan sehingga penerapannya bisa tepat sasaran.

Dalam rapat kabinet terbatas (ratas) soal Penerapan Subsidi Listrik 2016, Presiden mengungkapkan jika persoalan terkait subsidi listrik tersebut bisa dikalkulasi secara benar dan hati-hati.

“Cermat dalam menghitung dan cermat dalam nanti penerapannya sehingga betul-betul subsidi tepat sasaran. Terutama yang betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga rentan miskin. Ini harus betul-betul dipastikan mereka mendapatkan subsidi itu,” ujarnya, Rabu (22/6).

Selain itu, Presiden mengungkapkan agar data tersebut bisa divalidasi dengan baik agar jangan sampai ada perbedaan data sehingga keputusan bisa keliru.

“Saya ingin tegaskan sekali lagi, bahwa subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000MW yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Presiden.

Berdasarkan survei, dari 22,7 juta pelanggan listrik 900 VA hanya sekitar 4 juta pelanggan yang terdaftar dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sehingga sisanya tidak masuk dalam kategori pelanggan yang layak menerima subsidi listrik. Sementara itu, pelanggan listrik dengan daya 450 VA masih tetap disubsidi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pihaknya telah memiliki data dan angka penerima subsidi listrik. Namun, lanjutnya, Presiden meminta agar data tersebut diverifikasi ulang.

“Angkanya kita sudah ada dari 18 juta penerima subsidi di golongan 900VA, ada 260.000 yang perlu diverifikasi lagi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, Presiden tadi meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengkaji kembali dan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian tersebut. “Tapi intinya PLN tidak boleh dirugikan dan keputusan Banggar [Badan Anggaran] harus kita hormati,” ujarnya.

Dalam rapat Panitia Kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berlangsung Kamis (16/6), besaran *carry over* pembayaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik dalam RAPBN Perubahan 2016 disepakati sekitar Rp46,4 triliun. Angka ini naik dari pagu induk sekitar Rp22,3 triliun.

Khusus untuk listrik, kebutuhan subsidi tahun berjalan disepakati Rp38,4 triliun, tidak berubah dari APBN induk. Padahal, pemerintah mengusulkan adanya penambahan nilai subsidi Rp54,9 triliun, tapi ditolak DPR.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, penambahan besaran pagu subsidi memang seharusnya dilakukan karena sudah dinikmati oleh masyarakat. (Lukas Hendra)